

BAB I

PENDAHULUAN

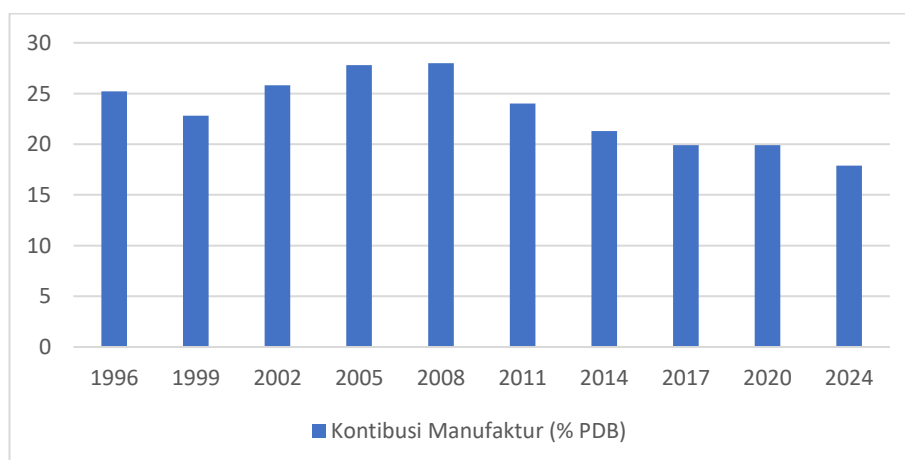
1.1 Latar Belakang

Fenomena transformasi struktural ekonomi merupakan dinamika yang dialami oleh sebagian besar negara dalam proses perkembangan ekonomi yang jangka panjang. Transformasi yang umumnya dicirikan dengan perpindahan kontribusi sektor ekonomi dari sektor yang primer (Pertanian) yang menuju ke sektor sekunder (Industri) dan melanjutkan ke sektor tersier (Jasa) menurut Kuznets, 1966. Proses industrialisasi ini menjadi tahapan yang kritis dalam pembangunan ekonomi karena sektor industri manufaktur yang memiliki karakteristik produktivitas yang tinggi, kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap sektor ekonomi lainnya. Dalam konteks global, negara-negara maju yang seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa yang telah mengalami proses deindustrialisasi yang natural setelah mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, biasanya di atas US\$ 15.000-20.000 per kapita (Rodrik, 2016). Deindustrialisasi natural ini terjadi karena sektor jasa yang berkembang pesat yang seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan perubahan pola konsumsi. Namun, fenomena deindustrialisasi ini berbeda yang terjadi pada negara-negara berkembang yang mengalami penurunan kontribusi sektor industri manufaktur

yang sebelum mencapai tingkat pendapatan yang memadai, yang dikenal sebagai “deindustrialisasi prematur” (Rodrik,2016).

Pada kondisi deindustrialisasi prematur ini telah menjadi perhatian yang serius dalam literatur ekonomi pembangunan karena dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang dan kemampuan negara dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif. Deindustrialisasi prematur ini mengacu pada penurunan peran sektor manufaktur dalam Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara berkembang sebelum mencapai “Potensi Penuh” (Rodrik,2016). Fenomena deindustrialisasi prematur yang terjadi di berbagai negara berkembang menimbulkan kekhawatiran karena sektor industri manufaktur *traditionally* yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian dengan produktivitas yang rendah menuju sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi (Badan Pusat Statistik,2024). Indonesia sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara yang menghadapi tantangan yang serupa dalam proses transformasi struktural ekonomi. Menteri PPN/Bappenas yang menyebutkan bahwa kontribusi industri terhadap perekonomian yang pernah mencapai 30%. Namun, kini hanya 19,66% penurunan kontribusi sektor industri manufaktur ini terjadi pada saat Indonesia belum mencapai status negara yang berpendapatan tinggi, dengan pendapatan per kapita yang masih berada di kisaran US\$ 4.000-5.000 per tahun (Kementerian PPN/Bappenas,2023). Ekonomi Indonesia yang mengalami deindustrialisasi sejak tahun 2000-an ini terjadi prematur, ketika perekonomian yang belum bisa dibilang kokoh (Thee,2006).

Proses deindustrialisasi prematur di Indonesia didorong dengan berbagai faktor struktural, yang termasuk ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor komoditas primer, lemahnya daya saing industri manufaktur, dan kebijakan ekonomi yang belum optimal dalam mendorong transformasi industri yang menuju aktivitas dengan nilai tambah yang lebih tinggi (Hill,2020;Resosudarmo&Yusuf,2006). Dampak deindustrialisasi prematur terhadap ketenagakerjaan ini juga menjadi perhatian yang utama mengingat bahwa sektor industri manufaktur ini memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang signifikan, terutama bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah (World Bank, 2020). Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi prematur karena proses penurunan kontribusi industri manufaktur terjadi lebih cepat sebelum Indonesia menyandang status sebagai negara yang berpendapatan tinggi. Kondisi yang berpotensi menciptakan tantangan struktural dalam pasar tenaga kerja, yang di mana perpindahan pekerja dari sektor industri tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja alternatif yang memiliki tingkat produktivitas dan upah yang sebanding (Rodrik,2015;BPS,2024).



Gambar 1.1

Perkembangan Kontribusi Sektor Manufaktur

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank (Data Diolah)

Berdasarkan gambar 1.1 kontribusi sektor manufaktur yang menunjukkan tren pertumbuhan yang menurun 25,2% pada tahun 1996 menjadi 22,8% pada tahun 1999 penurunan ini dapat mencerminkan kontraksi ekonomi dengan pertumbuhan PDB yang mencapai -13,1%. Namun, pada tahun 1999 pemulihan yang menunjukkan resiliensi sektor manufaktur dengan kontribusi yang kembali meningkat secara bertahap hingga 25,8% pada tahun 2002. Pemulihan ini juga didukung oleh kebijakan stabilitas makroekonomi dan reformasi struktural pemerintah pasca krisis (World Bank,2003). Pada tahun 2003 sampai tahun 2008 menandai keemasan sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor manufaktur yang mencapai puncak pada tahun 2007 sebesar 28,6% dari total PDB. Menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Kondisi perekonomian global yang kondusif dan stabilitas domestik yang terjaga pasca reformasi politik dan ekonomi (Thee,2006). Pada periode ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan industrialisasi yang telah diimplementasi pada sejak era orde baru dalam menciptakan basis industri. Namun sejak tahun 2008 yang menunjukkan bahwa fase deindustrialisasi prematur yang konsisten dan berkelanjutan kontribusi sektor manufaktur yang mengalami penurunan dari 28,0% pada tahun 2008 menjadi 21,3% pada tahun 2014 yang memandai penurunan sebesar 6,7 poin persentase dalam kurun waktu enam tahun. Penurunan ini terjadi lebih cepat dibandingkan dengan pola deindustrialisasi yang di alami dengan

negara-negara maju yang terjadi mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi (Rodrik,2015;Hill,2020).

Pada periode 2014 hingga 2024, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang menunjukkan bahwa pola stabil pada level yang relatif yang rendah, yaitu kisaran antara 17,9% hingga 21,3%. Walaupun sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun, tren umum selama periode ini dapat memperlihatkan bahwa sektor manufaktur tidak mampu kembali ke level kontribusi yang tinggi. Sebagai perbandingan, pada tahun 2007 kontribusi sektor manufaktur ini mencapai 28,6%. Namun, pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 kontribusi sektor manufaktur sebesar 27,9% dan menurun sebesar 10,7 poin persentase dalam kurun waktu sekitar 17 tahun (Badan Pusat Statistik,2024). Penurunan ini dapat mengindikasikan bahwa sektor manufaktur Indonesia terus mengalami stagnasi dan belum mampu menjadi pendorong utama pada pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik,2024; Rodrik,2015).

Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi fundamental yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi makro, yang mempengaruhi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro & Smith,2020). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan faktor siklikal seperti pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor struktural tersebut mencakup komposisi investasi yang

cenderung tidak merata ke sektor-sektor padat karya, yang rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari indikator seperti rata-rata lama sekolah, serta transformasi struktural ekonomi yang belum optimal, termasuk fenomena deindustrialisasi prematur di Indonesia memiliki faktor-faktor tertentu yang antara lain meliputi persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah seperti Vietnam dan Bangladesh. Apresiasi nilai tukar riil yang dapat mempengaruhi daya saing ekspor yang terjadi keterbatasan tenaga kerja (Dasgupta & Sigh,2006;Rodrik,2016). Selain globalisasi dan perubahan kebijakan perdagangan juga berperan dalam mempercepat deindustrialisasi di Indonesia. Peningkatan impor barang manufaktur dari negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah telah melemahkan daya saing industri dalam negeri (Felipe,2014).

Hal ini memberikan tekanan pasar tenaga kerja, terutama bagi angkatan kerja usia produktif dengan pendidikan menengah. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami fluktuasi signifikan dan tren tersebut tidak akan selalu bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (BPS,2023;Rodrik,2015). Pergeseran struktural dalam perekonomian Indonesia dari sektor industri manufaktur ke sektor jasa yang terjadi pada sebelum waktunya dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja di Indonesia, sektor jasa yang berkembang didominasi oleh kegiatan perdagangan ritel, transportasi informal, dan jasa rumah tangga yang cenderung memiliki produktivitas rendah dan tidak mampu menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah yang besar (Bank Indonesia,2022). Sementara itu, sektor

jasa modern mengalami pertumbuhan yang pesat, kapasitas untuk menyerap tenaga kerja formal dengan produktivitas dan upah yang tinggi dan tidak sebanding dengan



sektor manufaktur.

Gambar 1.2

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank (Data Diolah)

Pada periode sebelumnya krisis ekonomi Asia, tingkat pengangguran Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas yang relatif baik dengan angka yang berkisaran antara 4,4% hingga 4,9%. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang kuat ada pada era Orde Baru dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang mencapai 7-8% per tahun (Hill,2000). Pada tahun 1965 kontribusi sektor pertanian yang masih sekitar 56% dari PDB, maka sebelum memasuki krisis ekonomi pada tahun 1997 tercatat hanya sisa 16% dari PDB (Booth,1998). Sedangkan sektor industri manufaktur selama periode 1980 hingga 1997, mendapatkan pertumbuhan rata-rata mencapai 10,9% (World Bank, 1999). Pertumbuhan sektor manufaktur yang pesat pada periode tersebut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang memadai yang sehingga tingkat pengangguran dapat dipertahankan pada level yang rendah

(Timmer,1999). Pada krisis ekonomi Asia pada 1997 hingga 1998 yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tingkat pengangguran Indonesia. Data yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran dari 4,7% pada tahun 1997 menjadi 5,5% pada tahun 1998 (BPS,1999). Peningkatan ini dapat terlihat moderat dalam angka absolut, dengan dampak krisis terhadap struktur ketenagakerjaan sangat mendalam. Krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menjadi titik balik pertama dalam Trajektori Industrialisasi Indonesia (Hill,2000). Kontraksi ekonomi yang drastis dengan pertumbuhan PDB yang mencapai -13,1% pada tahun 1998 yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal di berbagai sektor dan terutama di sektor industri manufaktur dan jasa (World Bank,1999;Aswicahyono et al.,2000). Periode pasca krisis yang menunjukkan tren peningkatan tingkat pengangguran yang berkelanjutan dan dapat mengkhawatirkan, tingkat pengangguran yang meningkat sebesar 6,4% pada tahun 1999 hingga mencapai puncaknya sebesar 11,2% di tahun 2005 (BPS,2006). Fenomena ini dapat mencerminkan pemulihan ekonomi yang lambat dan tidak merata yang di mana pertumbuhan ekonomi di mulai pulih belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah (Islam et al.,2006). Kondisi ini diperburuk oleh perubahan struktur ekonomi yang di mana sektor manufaktur yang sebelumnya menjadi penyerapan tenaga kerja utama, mulai mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB (Hill & Narjoko,2007).

Mulai tahun 2006, menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran yang konsisten hingga mencapai titik terendah sebesar 5,9% pada tahun 2014 (BPS,2015). Perbaikan yang terjadi dengan stabilisasi kondisi ekonomi makro dan

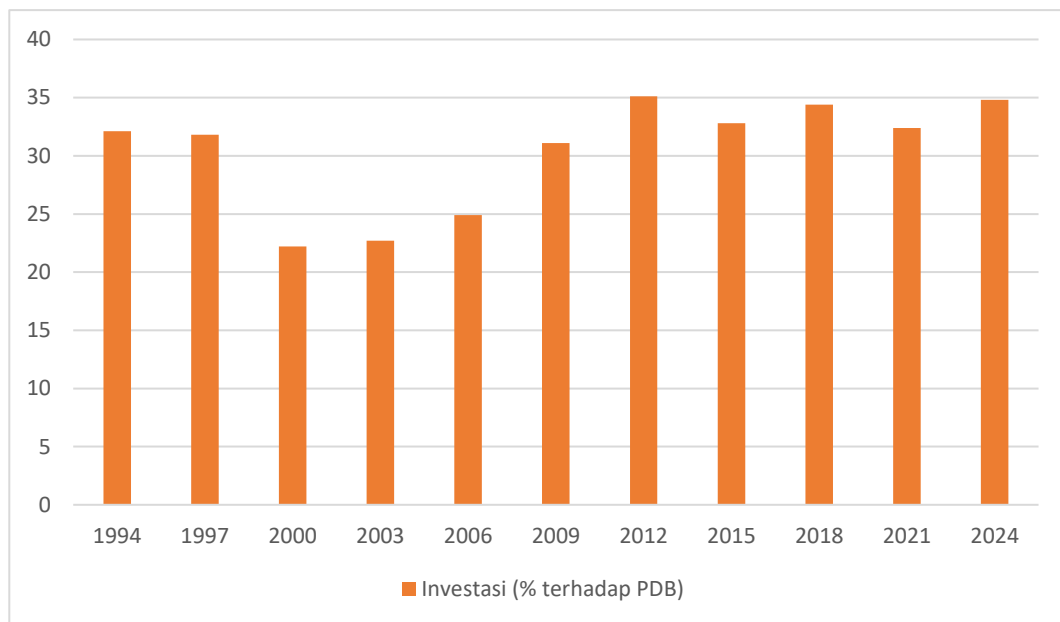
implementasi berbagai program ketenagakerjaan pemerintah (World Bank, 2016). Tingkat pengangguran menurun sebesar 4,63% pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yang di mulai membuahkan hasil meskipun masih menghadapi tantangan struktural (BPS,2024). Pada periode 2015 hingga 2019 menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif stabil yang berkisaran 5,2% hingga 6,2% (BPS,2020). Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7,1%, dampak dari pembatasan aktivitas ekonomi terhadap ketenagakerjaan (World Bank,2021;BPS,2021). Jumlah pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 7,05 juta orang menjadi 7,86 juta orang, meskipun tren jangka panjang menunjukkan penurunan tingkat pengangguran, perubahan struktural dalam komposisi lapangan kerja yang mengindikasikan dampak deindustrialisasi prematur (BPS,2023). Pola tingkat pengangguran yang menunjukkan korelasi yang kompleks dengan fenomena deindustrialisasi prematur. Berdasarkan data BPS tahun 2008, proporsi sektor pengolahan terhadap PDB nasional yang mencapai 27,8%,sedangkan pada tahun 2018 sebesar 19,8%, yang menunjukkan penurunan sekitar 8% dalam satu dekade (BPS,2009;BPS,2019). Penurunan kontribusi sektor manufaktur yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran, mengindikasikan adanya perpindahan tenaga kerja ke sektor lain, terutama sektor jasa informal (Timmer,2020;Rodrik,2016).

Fenomena deindustrialisasi prematur, dinamika investasi sebagai faktor kunci dalam pembentukan kapital dan penciptaan lapangan kerja. investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman

Modal Asing (PMA), memiliki peran yang strategis dalam menentukan arah transformasi struktural ekonomi. Pola investasi yang tidak optimal dalam sektor industri manufaktur dapat mempercepat deindustrialisasi prematur dan berdampak negatif terhadap kemampuan perekonomian dalam penyerapan tenaga kerja (Solow,1956). Investasi sebagai salah satu determinan utama dalam pertumbuhan ekonomi dan permintaan agregat (*Aggregate Demand*) yang memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan deindustrialisasi prematur, yang khususnya di negara yang berkembang seperti Indonesia. Dalam jangka pendek investasi juga berfungsi sebagai stimulus permintaan agregat yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang melalui peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi (Mankiw,2021). Namun, yang lebih penting adalah kontribusi investasi terhadap peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas dalam jangka yang panjang yang menjadi fondasi bagi proses industrialisasi yang berkelanjutan (Todaro&Smith,2020). Dalam konteks sektor manufaktur, investasi ini dapat memperkuat struktur industri domestik dengan meningkatkan efisiensi teknologi, memperluas basis produksi dan mempercepat inovasi yang sehingga produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar internasional (Rodrik,2016).

Peningkatan investasi yang mendorong pertumbuhan produksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran. Namun, realitas empiris di Indonesia yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran, yang terutama investasi tersebut didominasi oleh sektor-sektor pada modal atau tidak terkoneksi secara langsung dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

domestik (World Bank,2020). Ketidaksesuaian antara investasi dan struktur tenaga kerja nasional yang menimbulkan kesenjangan dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga investasi tidak menghasilkan efek yang optimal terhadap penurunan pengangguran. Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil pada kisaran 5-6% selama periode 2000-2019 sebelum pandemi COVID-19, tingkat pengangguran ini cenderung tidak menurun secara yang signifikan seperti yang diprediksi oleh Hukum Okun (Okun,1962;BPS,2021). Fenomena ini menandakan adanya karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya bersifat inklusif, pertumbuhan yang terjadi lebih banyak ya ditopang oleh sektor yang kurang intensif dalam penyerapan tenaga kerja, seperti pertambangan, konstruksi skala besar, serta industri dengan tingkat otomasi tinggi (ILO,2020). Di sisi lain, sektor padat karya yang seperti manufaktur justru akan menunjukkan kecenderungan stagnasi atau penurunan kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja dengan proses deindustrialisasi prematur yang berlangsung dalam perekonomian Indonesia (Rodrik,2016). Dampak deindustrialisasi prematur terhadap pengangguran di Indonesia yang memiliki dimensi yang kompleks, karena tidak hanya terkait dengan kuantitas lapangan kerja yang tersedia, kualitas dan ketahanan sektor industri manufaktur yang mengalami kontraksi atau stagnasi pada tahap pendapatan menengah, maka kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja dengan produktivitas tinggi pun ikut menurun. Hal ini dapat menyebabkan sebagian besar tenaga kerja yang ikut masuk ke sektor informal atau sektor dengan produktivitas rendah (Palma,2005;McMilan & Rodrik,2011).



Gambar 1.3

Perkembangan Investasi Asing (FDI)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank (Data Diolah)

Data dari Internasional Labour Organization (ILO) yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran signifikan dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia yang selama periode 1994 hingga 2024. Proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur yang mengalami penurunan, dari sekitar 15,2% pada tahun 1994 yang menjadi 11,1% pada tahun 2024 (ILO,2024). Namun, sebaliknya proporsi tenaga kerja disektor jasa yang mengalami peningkatan yang cukup tajam, dari 32,1% pada tahun 1994 dan menjadi lebih dari 34,8% pada tahun 2024 (ILO,2024). Pergeseran ini mencerminkan tren struktural jangka panjang yang menunjukkan bahwa kecenderungan perekonomian Indonesia untuk lebih mengandalkan sektor tersier, dibandingkan dengan memperkuat sektor industri pengolahan sebagai motor utama pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja produktif. Perubahan struktur

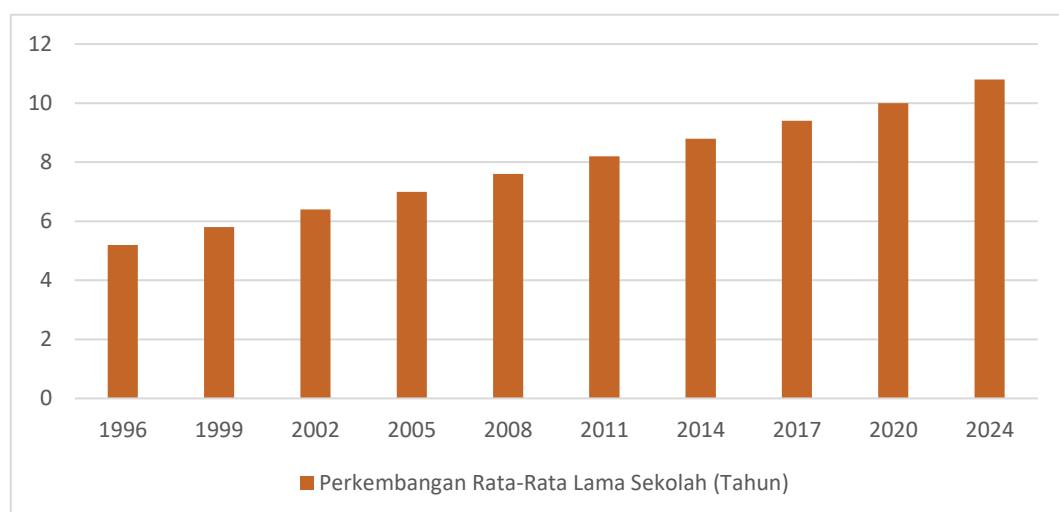
ketenagakerjaan ini yang sejalan dengan pergeseran alokasi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) dari sektor manufaktur ke sektor jasa.

Selama periode 1994-2024 terjadi penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap total FDI yang masuk ke Indonesia, dari 48% pada tahun 1994 menjadi 32% pada tahun 2024, sektor jasa menunjukkan peningkatan yang mencolok, dari 35% menjadi 53% dalam periode yang sama (BKPM,2024). Pergeseran ini menandakan adanya perubahan preferensi investor global yang semakin tertarik pada sektor jasa yang khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keuangan digital, logistik, serta pariwisata (World Bank, 2023). Konsentrasi industri manufaktur di Indonesia yang masih terpusat di pulau Jawa, terutama di wilayah Jabodetabek, Bandung dan Surabaya. Ketimpangan yang menyebabkan gejala deindustrialisasi yang terasa paling kuat di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis utama kegiatan industri pengolahan. Menurunnya proporsi tenaga kerja di sektor manufaktur dan stagnasi kapasitas produksi industri yang menyebabkan berkurangnya penciptaan lapangan kerja formal dan produktif di kawasan tersebut, yang pada akhirnya memicu peningkatan informalitas dan ketimpangan ekonomi regional (BPS,2023;Tregenna,2015). Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencatat bahwa nilai FDI yang meningkat dari sekitar US\$ 10,8 miliar pada tahun 1994 dan menjadi US\$ 46,2 miliar pada tahun 2023 (BKPM,2024). Namun yang menarik adalah perubahan komposisi sektoral dari investasi, pada awal periode 1990-an sekitar 45-48% dari total FDI diarahkan ke sektor manufaktur, dan sedangkan pada tahun 2020-an proporsi menurun secara signifikan menjadi 32%. Namun, sebaliknya proporsi

investasi yang diarahkan ke sektor jasa yang meningkat dari sekitar 35% menjadi 53% dalam periode yang sama (BKPM,2024;UNCTAD,2023). Fenomena ini berkaitan dengan deindustrialisasi prematur yang lebih condong pada sektor jasa yang berbasis teknologi dan konsumsi perkotaan, dibandingkan pengembangan sektor industri manufaktur. Dalam konteks Indonesia, perubahan yang orientasi memiliki implikasi yang serius terhadap proses industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja. Menurunnya investasi di sektor manufaktur dapat menghambat proses ekspansi dan modernisasi industri, deindustrialisasi prematur yaitu menurunnya peran sektor manufaktur sebelum negara mencapai tahap pendapatan tinggi, yang berpotensi menghambat transformasi struktural dan pertumbuhan inklusif (Rodrik,2016;Tregenna,2015).

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu determinan yang paling penting dalam menentukan kondisi ketenagakerjaan suatu negara. Yang di mana semakin tinggi tingkat pendidikan individu, semakin besar pula peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, produktif dan berupah tinggi (Todaro & Smith, 2020). Menurut Becker (1993) yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan itu akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi risiko pengangguran. Namun, terdapat tantangan berupa fenomena *mismatch* rata-rata lama sekolah itu sendiri semakin meningkat (BPS,2024), tingkat pendidikan terdidik justru menunjukkan bahwa tren yang mengkhawatirkan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Ketidakseimbangan spasial dalam dampak deindustrialisasi prematur juga menjadi perhatian yang penting. Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan angkatan kerja dengan kebutuhan

pasar kerja yang bisa berubah (*education mismatch*) yang akan semakin memperburuk masalah pengangguran struktural di Indonesia. Struktur perekonomian Indonesia yang masih didominasi oleh sektor primer (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) serta sektor tersier (Perdagangan, jasa informal, dan Pariwisata), yang belum mampu menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi (Maliine,2024;World Bank,2023). Seiring dengan berkurangnya lapangan kerja dengan pendidikan menengah, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tersebut semakin sulit terserap dalam perekonomian (World Bank,2022).



Gambar 1.4

Perkembangan Tingkat Pendidikan

Sumber: World Bank dan Badan Pusat Statistik (BPS) (Data Diolah)

Hubungan antara deindustrialisasi prematur dan tingkat pengangguran yang memiliki beberapa alasan yang di mana sektor manufaktur memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat keterampilan, terutama tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang menengah (Haraguchi,2017).

Deindustrialisasi prematur dapat mempengaruhi struktur permintaan tenaga kerja, di mana permintaan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan yang menengah itu menjadi menurun, sementara permintaan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan tinggi dan rendah meningkat. Fenomena ini, dikenal sebagai “*Job Polarization*” yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran struktural (Autor,2006;Goos,2014). Di Indonesia, fenomena ini dapat menjadi lebih kompleks dikarenakan terjadi bersamaan dengan transformasi struktural ekonomi yang tidak seimbang. Selama tahun 1994-2023, Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat pada sektor jasa, yang terutama jasa keuangan dan digital, namun pertumbuhan ini tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi dan ketrampilan yang sesuai dengan tenaga kerja yang bergeser dari sektor manufaktur (Hill & Yean, 2021). Ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) yang berpotensi memperburuk masalah pengangguran struktural di Indonesia. Indonesia juga dapat menghadapi tantangan demografis berupa “Bonus Demografi” yang di mana proporsi penduduk usia yang produktif mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030 (Adioetomo & Mujahid,2016). Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas semakin penting jika deindustrialisasi prematur menghambat penciptaan lapangan kerja, maka Indonesia dapat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi manufaktur terhadap PDB dan tingkat pengangguran Indonesia yang sehingga penulis tertarik untuk memilih judul “ANALISIS PENGARUH

DEINDUSTRIALISASI PREMATUR TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN 1994-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis. Identifikasi masalah yang di kaji pada penelitian ini adalah:

1. Indonesia tengah menghadapi fenomena deindustrialisasi prematur yaitu yang di mana kondisi menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian yang sebelum mencapai tingkat pendapatan yang tinggi. Hal ini terlihat dari menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu dari 29,5% pada tahun 2000 yang menjadi 19,87% pada tahun 2022. Selain itu, proporsi tenaga kerja di sektor manufaktur juga yang mengalami penurunan dari 13,2% pada tahun 2000 yang menjadi 12,36% pada tahun 2022.
2. Rata-rata pertumbuhan tahunan sektor manufaktur dalam periode 2010-2019 hanya mencapai 4,5% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,4%. Dalam kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor industri ini tidak lagi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional seperti pada masa sebelumnya. Negara-negara maju yang pada umumnya mengalami deindustrialisasi setelah mencapai pendapatan per kapita yang tinggi, sedangkan Indonesia mengalami hal tersebut dalam kondisi pendapatan per kapita yang masih relatif yang rendah, yang dapat mencerminkan terjadinya deindustrialisasi prematur.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia yang menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2000-2023. TPT meningkat dari 6,08% pada tahun 2000 menjadi 1,24% pada tahun 2005, yang kemudian menurun secara bertahap menjadi 5,28% pada tahun 2019. Namun, pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan TPT menjadi 7,07% pada tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 5,32% pada tahun 2023. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, tingkat pengangguran Indonesia masih tergolong tinggi.
4. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses deindustrialisasi yang terjadi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan pengangguran. Sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab hubungan antara deindustrialisasi dan pengangguran antara lain: kemajuan teknologi dan otomatisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, kurangnya optimal kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor industri, serta pengaruh globalisasi dan perubahan struktur rantai nilai global.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan tingkat pengangguran, deindustrialisasi prematur, investasi, dan tingkat pendidikan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh deindustrialisasi prematur, investasi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia?

1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis perkembangan tingkat pengangguran, deindustrialisasi prematur, investasi, dan tingkat pendidikan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh deindustrialisasi prematur, investasi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta memberikan kontribusi. Adapun manfaat penelitian terbagi atas, manfaat teoritis dan praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta pengembangan ilmu pengetahuan yang ada. Selain itu juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi inovasi dalam kajian baru terkait suatu fenomena deindustrialisasi prematur. Penelitian ini juga dapat menjadi sebuah topik untuk memperdalam kajian tersebut serta penelitian ini dapat menjadi bahan

referensi serta acuan bagi lembaga pendidikan yang ada khususnya Universitas Pasundan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam sarana informasi serta edukasi yang berguna khususnya untuk lembaga pendidikan yang memperelajari ilmu ekonomi.

2. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan literasi serta edukasi ilmu pengantuhan baru umumnya di bidnag ekonomi yang terus melekat pada khalayak umum dan khususnya di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pasundan.

3. Bagi Mahasiswa/i

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi baru mengenai deindustrialisasi prematur / kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB ataupun kepada mahasiswa/i yang tertarik untuk meneliti kajian ini leih lanjut.

4. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tantangan dan ilmu pengantuhan baru khususnya di bidang ekonomi bagi penulis. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bagi penulis sehingga suatu saat dapat berguna di kehidupan selanjutnya.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini menganalisis pengaruh deindustrialisasi prematur terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 1994-2023 dan penelitian ini mencakup perkembangan sektor industri manufaktur, perubahan kontribusi sektor industri terhadap PDB, penelitian ini juga menggunakan data makroekonomi seperti tingkat pengangguran terbuka, kontribusi sektor industri terhadap PDB serta faktor eksternal penelitian ini berfokus pada Indonesia secara nasional data yang digunakan mencakup tahun 1994-2023.

1.7 Gap Penelitian (Research Gap)

1.7.1 Gap Teoritis (Theoretical Gap)

Penelitian yang mengenai deindustrialisasi prematur di Indonesia masih terbatas pada analisis deskriptif dan belum mengintegrasikan secara komprehensif faktor-faktor determinan pengangguran dalam satu model ekonometrika. Seperti penelitian Widjaya Adi dari LIPI yang lebih berfokus pada identifikasi gejala deindustrialisasi tanpa menganalisis dampak kuantitatif terhadap pasar tenaga kerja (LIPI,2015). Sementara itu, kerangka teoritis (Rodrik,2016) tentang deindustrialisasi prematur belum sepenuhnya diaplikasikan dalam konteks yang empiris Indonesia dengan mempertimbangkan variabel investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia secara yang simultan.

1.7.2 Gap Empiris (Empirical Gap)

Penelitian yang empiris yang menganalisis pengaruh deindustrialisasi prematur terhadap pengangguran di Indonesia dengan menggunakan data time series dengan periode yang panjang dan itu masih sangat terbatas. Studi-studi yang ada dalam penelitian Agustina (2023) hanya menganalisis determinan pengangguran periode 2012-2021 tanpa memasukkan variabel deindustrialisasi prematur. Penelitian ini tentang pengaruh jumlah industri terhadap penngangguran yang dilakukan di Jawa Barat periode 2017-2020 yang belum menangkap fenomena deindustrialisasi prematur yan secara eksplisit.

1.7.3 Gap Konteksual (Contextual Gap)

Konteks ekonomi di Indonesia yang mengalami berbagai guncangan ekonomi sepanjang periode 1994-2023 yang termasuk krisis moneter 1998, krisis global 2008, dan pandemi COVID-19, belum dianalisis yang secara komprehensif dalam kaitannya dena proses deindustrialisasi prematur dan dampaknya terhadap pengangguran. Data BPS menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran dari 7,05 juta orang (2019) menjadi 7,86 juta orang (2023). Namun, belum ada penelitian yang mengaitkan dengan tren proses deindustrialisasi prematur yang terjadi di Indeonnesia.